



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**WEWENANG KERAPATAN ADAT NAGARI SUNGAI PUA BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7
TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DI NAGARI SUNGAI PUA
KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ADIT SEKOFIER

11727102197

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1442 H/ 2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam "** yang ditulis oleh:

Nama : ADIT SEKOFIER

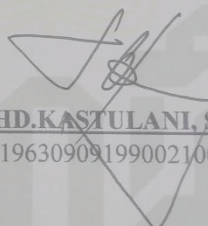
NIM : 11727102197

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 1442 H
2021 M

Pembimbing Skripsi


H.MHD.KASTULANI, SH., MH
NIP. 196309091990021001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"WEWENANG KERAPATAN ADAT NAGARI SUNGAI PUA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DI NAGARI SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM"* yang ditulis oleh :

Nama : **ADIT SEKOFIER**
 NIM : 11727102197
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Jumat, 6 Agustus 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Asri, SH., MH

Sekretaris
Dr. M. Alfi Syahrin., SH., MH

Penguji I
Peri Pirmansyah, SH., MH

Penguji II
Nyssa Angraini, SH., MH

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Adit Sekofier, 11727102197 : Wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam

Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Dalam Pasal 7 angka 2 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tentang Nagari menjelaskan wewenang Kerapatan Adat nagari yaitu: memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat, menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari, meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari dan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari. masih dilaksanakannya Pemilihan Walinagari pada tahun 2018 dan meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada walinagari masih dilakukan oleh Badan Munsyawarah Nagari di Nagari Sungai Pua.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana wewenang Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam dan Apa faktor penghambat wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam.

Metode penelitian skripsi yaitu dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam Sumatera Barat dengan menggunakan metode deduktif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Serta menganalisis data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum dan bersifat khusus. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria – kriteria tertentu. dan *Quota Sampling* adalah teknik sampling yang menentukan jumlah sample dari populasi yang memiliki ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan.

Hasil Penelitian ini menunjukan wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua di Nagari Sungai Pua belum terlaksana secara baik dan optimal. Faktor penghambat Kerapatan Adat Nagari dalam menjalani wewenang di Nagari Sungai Pua adalah Kurangnya Kesadaran Kerapatan Adat Nagari Untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Minimnya peran pemerintahan provinsi dalam pembinaan Kerapatan adat Nagari, Perbedaan pandangan dan perubahan kultur masyarakat adat, Kurangnya Anggaran APNag dalam Pengembangan Adat Istiadat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Alm. Nofiar Datuak Nan Aluih dan Ibunda Dra. Erna, abang kandung Dio Maikha, kakak kandung Wangi Nofina dan Adek kandung Cerita Maulina dan Fandano.
Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

Bapak Asril, SH., MH selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

Bapak H. Mohd. Kastulani, SH, MH sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.

6. Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc., M.A sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.

Bapak Fiki Ananda, A.Md selaku Wali Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam Sumatera Barat dan jajarannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Datuak Bagindo selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua dan Niniak Mamak di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam Sumatera Barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum B'17 dan teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2017 yang telah memotivasi, berbagi ilmu,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

wawasan selama kuliah, dan telah berjuang bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat.

1. Kepada Muhammad Rifqi, Robi Piterio, Andre Rahmad, dan Fuadi Ramdani yang telah memotivasi dan memberikan masukan dalam skripsi ini hingga selesai.

Semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dengan kebaikan yang jauh lebih baik dan mendapatkan ridho-Nya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 6 Agustus 2021

ADIT SEKOFIER
NIM. 11727102197

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Metode Analisi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	15
A. Gambaran Umum Kabupaten Agam	15
1. Sejarah Kabupaten Agam	15
2. Kondisi Geografis Kabupaten Agam.....	16
3. Kondisi Demografis Kabupaten Agam.....	20
B. Gambaran Umum Nagari Sungai Pua	21
1. Kondisi Geografis Nagari Sungai Pua.....	22
2. Kondisi Demografi Nagari Sungai Pua	23
3. Kondisi Topografi Nagari Sungai Pua	24
4. Sarana Pendidikan Nagari Sungai Pua	25
5. Visi Misi Nagari Sungai Pua	26
C. Sturuktur Organisasi Pemerintahan Nagari Sungai Pua	27
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Teori Hukum Adat.....	28
1. Hukum Adat	28
2. Hukum Adat di Minangkabau	31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Teori Nagari dan Desa	34
1. Pengertian Nagari	34
2. Pengertian Desa	40
3. Kewenangan Pemerintahan Nagari	43
4. Dasar Hukum Pemerintahan Nagari	44
C. Teori Kewenangan dan Wewenang	45
D. Kerapatan Adat Nagari	47
E. Teori Demokrasi	51
1. Pengertian Demokrasi	51
2. Jenis-Jenis Demokrasi	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN.....	54
A. Wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam	54
B. Faktor Pengambat Wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam	67
BAB V PENUTUPAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABLE

Tabel I.1	Populasi dan Sample Penelitian	11
Tabel II.1	Nama Nagari di Kabupaten Agam	17
Tabel II.2	Luas Wilayah Jorong di Nagari Sungai Pua	23
Tabel II.3	Jumlah Penduduk Nagari Sungai Pua	24
Tabel II.4	Luas Lahan Nagari Sungai Pua	25
Tabel II.5	Sarana Pendidikan Nagari Sungai Pua	26
Tabel II.6	Keanggotaan Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua	27
Tabel IV.1	Tanggapan masyarakat tentang menyetujui memilih dan mengangkat walinagari secara musyawarah mufakat oleh Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua	59
Tabel IV.2	Tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan memilih dan mengangkat walinagari secara musyawarah mufakat oleh Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua sudah terlaksana dengan baik	59
Tabel IV.3	Tanggapan masyarakat tentang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua dapat menerima aspirasi masyarakat nagari dengan baik	61
Tabel IV.4	Tanggapan masyarakat tentang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari terlaksana dengan baik	61
Tabel IV.5	Tanggapan masyarakat tentang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua responsif terhadap pengawasan pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari	63
Tabel IV.6	Tanggapan masyarakat tentang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari	64
Tabel IV.7	Tanggapan masyarakat tentang Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga pelaksana penyelenggaraan pemerintahan nagari	65
Tabel IV.8	Tanggapan masyarakat tentang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua meminta pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan nagari kepada walinagari terlaksana dengan baik	66
Tabel IV.9	Tanggapan masyarakat tentang Kerapatan Adat Nagari menyediakan sarana dalam melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari	67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.10 Tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua dalam melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari terlaksana dengan baik





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Peta Kabupaten Agam	17
Gambar II.2 Peta Nagari Sungai Pua	22
Gambar II.3 Bagan Pemerintah Nagari Sungai Pua	27



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki bermacam adat-istiadat yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka telah ada satuan-satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Satuan ini merupakan satuan-satuan ketatanegaraan. Satuan-satuan tersebut disebut desa.¹ Pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Soepomo dalam pidato pertamanya ia menyampaikan “*susunan ketatanegaraan asli Indonesia terdapat di desa-desa. Apa yang dibayangkan soepomo dengan susunan ketatanegaraan asli di desa itu terbatas pada konsep bersatunya pemimpin (kepala desa) dengan rakyatnya*”.² Dari pendapat Soepomo dia berpandangan sistem pemerintahan di wilayah-wilayah Indonesia telah ada sebelum kemerdekaan yang berada di desa.

Salah satu kelompok masyarakat adat yang ada di Indonesia adalah masyarakat Minangkabau yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau memiliki sistem pemerintahan sendiri yang telah ada sebelum Indonesia merdeka yaitu Nagari. Setelah kemerdekaan Indonesia dalam Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat*

¹ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1981), h.23.

² Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*berserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.*³

Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat yang merupakan pemerintahan yang berdasarkan adat istiadat telah di berikan kewenangan yang di atur didalam peraturan perundang-undangan. Yaitu, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yakni, *“kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembagian desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat”*.⁴

Pada dasarnya kedudukan nagari dan desa sama di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 6 menyebutkan 2 jenis desa yaitu desa dan desa adat. Penyebutan desa atau desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.⁵ Kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul di jelaskan dalam pasal 103 meliputi, pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan ulayat, pelestarian nilai sosial budaya adat, penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat, penyelenggaraan sidang peradilan desa adat.⁶ Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di

³ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 B Ayat 2.

⁴ Yusnani Hasyimzoem, et.al., *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 131.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, Pasal 6.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, Pasal 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku.⁷

Dengan di akuinya desa adat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari mencabut berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Nagari, di karenakan tidak sesuai lagi dengan semangat memperkuat nagari sebagai penyelenggaraan pemerintah berdasarkan hukum adat. Di peraturan daerah ini memperkuat fungsi dan wewenang lembaga-lembaga yang berada di nagari seperti Walinagari, Kerapatan Adat Nagari dan Peradilan Nagari.

Di Sumatera Barat betuk kearifan lokal dari pemerintahan desa adalah kesatuan hukum nagari yang tersusun dari mamak, kerapatan family, penghulu, kerapatan suku, kerapatan nagari dan tuo rapat.⁸ Dahulu nagari dipimpin oleh seorang penghulu yang di angkat oleh beberapa penghulu jorong yang dilakukan secara musyawarah mufakat. Akan tetapi setelah masuknya pengaruh Belanda ke daerah Minangkabau kedudukan penghulu tergantikan oleh walinagari dan para penghulu dikumpulkan dalam satu lembaga Kerapatan Adat Nagari.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, Penjelasan, hal. 7.

⁸ Yasril Yunus, "Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau", Volume 6., NO. 2., (2007), h. 213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam lembaga yang berisikan penghulu adalah Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua. Setiap penghulu memiliki gelarnya masing-masing dari sukunya. Kedudukan penghulu di Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua sama tinggi karena mereka menggunakan adat kelarasan Bodi Chaniago. Sebelum tahun 2019 Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua melaksanakan tugas dan wewenangnya hanya sebatas masalah adat. Ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Nagari. Setelah keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua berkedudukan sebagai lembaga yang ikut dalam penyelenggaraan pemerintah nagari dan tidak hanya sebatas masalah adat.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang keanggotaan terdiri dari perwakilan Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Parik Paga Nagari.⁹ Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari dijelaskan Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua memiliki wewenang di jelaskan dalam Pasal 7 ayat 2 berbunyi :¹⁰

Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memilih dan mengangkat kapalo nagari secara musyawarah mufakata;
- b. Menyalurkan anspirasi masyarakat nagari;

⁹ Indonesia, Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, tentang Nagari, Pasal 1 Ayat 6.

¹⁰ Indonesia, Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, tentang Nagari, Pasal 7 Ayat 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya nagari;
- d. Memintak pertanggung jawaban pelaksanaan pemerintahan nagari kepada kapalo nagari; dan
- e. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai adat salingka nagari.

Dalam pasal 7 ayat 2 terkandung keinginan pemerintah provinsi untuk mengembalikan lagi kekuatan dan kedudukan KAN yang berisi para penghulu kaum ini agar menjalankan fungsi tradisonalnya dalam penyelenggaran pemerintahan nagari.

Menurut hasil observasi penulis yang bertanya kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua yakni Datuak Bagindo bahwa Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua merupakan lembaga tempat berkumpulnya penghulu-penghulu suku yang ada di Nagari Sungai Pua. Dalam menjalankan wewenangnya Kerapatan Adat Nagari sesuai Dengan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Sungai Pua belum berjalan secara efektif ini disebabkan masih timbulnya multitafsir di kalangan penghulu terhadap beberapa poin dalam pasal ini khususnya dalam wewenang memilih dan mengangkat walinagari secara musyawarah mufakat dan meminta pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan nagari kepada walinagari.¹¹

Dalam memilih dan mengangkat walinagari secara musyawarah mufakat Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua belum terlaksanakan. Disebabkan

¹¹ Datuak Bagindo, Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua, wawancara, Bukittinggi, 6 Januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurang setujunya para penghulu karena akan mencederai demokrasi langsung yang telah tumbuh di dalam masyarakat nagari. Menurut Datuak Bagindo memilih walinagari secara musyawarah mufakat bukan jalan satu-satunya dalam memilih walinagari karena akan menimbulkan protes dari anak kamanakan. Kurang siapnya Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua dalam menjalankan wewenang ini di buktikan dengan masih dilaksanakannya Pemilihan Walinagari tahun 2019 secara langsung oleh masyarakat nagari.

Sedangkan, Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua dalam Memintak pertanggung jawaban pelaksanaan pemerintahan nagari kepada walinagari belum terlaksanakan ini disebabkan masih adanya lembaga Badan Musyawarah Nagari Sungai Pua yang menjalankan wewenang tersebut. Serta masih kurang siapnya para penghulu Kerapatan Adat Nagari Sungai dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan nagari. ini juga disebabkan masih kurangnya instrumen kabupaten Agam terhadap kedudukan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga adat yang independen atau lembaga penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertaik mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam serta apa faktor penghambat wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua. Maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul **“Wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam”**.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang dikaji maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu hanya mengenai wewenang Kerapatan Adat Nagari dengan mengkaji Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam?
2. Apa faktor penghambat wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah penelitian berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian, terkait perumusan masalah dan judul. Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam dalam pelaksanaan wewenangnya.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara teoristis dan praktis yaitu :

- a. Secara teoristis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, utamanya dalam ilmu hukum.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti sejenis, pada masa mendatang.
- b. Secara praktis
 - 1) Sebagai syarat untuk melengkapi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum.
 - 2) Bagi penulis, hasil ini dapat menambah wawasan di bidang hukum.
 - 3) Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini dapat memberi informasi tentang wewenangan Kerapatan Adat Nagari menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam.
 - 4) Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna dalam pertimbangan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil kebijakan dan perumusan suatu aturan yang jelas, khususnya dalam wewenang Kerapatan Adat Nagari menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam.

Metode Penelitian

Metodel penelitian atau metodologi adalah ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersifat sistem, sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti suatu disiplin ilmu.¹² Secara umum metode penelitian merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.¹³

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiries yakni penelitian langsung lapangan. Penelitian lapangan suatu penelitian yang dilakukan pada suatu lokasi yang dipilih untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi dilokasi tersebut.¹⁴ Dimana penelitian ini dilakukan terhadap wewenang Kerapatan Adat Nagari menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam.

¹² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2011), h. 22.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Abdurahmat Fathoni, *Metode penelitian & teknik penyusunan skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam, dalam hal ini penulis melakukan penelitian dan mengambil data dari Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam. Tujuan penulis melakukan penelitian disini untuk mengetahui wewenang Kerapatan Adat Nagari di Nagari sungai Pua berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, yang kejadian atau hal minat yang ingin penelitian investigasi, sedangkan sample adalah proses pemilihan sejumlah elemen secukupnya dari populasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Purposive Sampling merupakan teknik penentuan sample dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sample dan dalam pemilihan sampel masyarakat metode yang di gunakan Quota Sampling adalah teknik sampling yang menentukan jumlah sample dari populasi yang memiliki ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan.¹⁵

Adapun yang menjadi yang menjadi populasi dan sample dalam penelitian ini, sebagai berikut:

¹⁵ Juliansyah Noor, *op. cit.*, hlm. 69-70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Populasi dan Sample Penelitian

No	Responden	Populasi	Sample	Persentase
1	Wali Nagari	1	1	100%
2	Ketua Kerapatan Adat Nagari	1	1	100%
3	Ketua Urusan Perdamaian Adat Badan Musyawarah Nagari	1	1	100%
4	Masyarakat	14.078	30	0,22%
Jumlah		14.081	33	0,23%

4. Sumber Data

Sumber data merupakan segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dirumuskan. Untuk meyakini kebenaran dan keakuratan data yang diperoleh peneliti, maka harus melakukan pemeriksaan kembali antara data yang diperoleh dari lapangan. Data tersebut berbentuk catatan hasil wawancara, observasi, pengamatan, dan berbagai bentuk dokumen.¹⁶

Dalam melakukan penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan, yaitu :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian. Baik dilakukan dengan observasi atau wawancara. Observasi dengan pengamatan yang merupakan suatu pengumpulan data pada penelitian sosiologis.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang sudah diolah berdasarkan kebutuhan dari penelitian ini.

¹⁶ Arifiany, *Implementasi Metode Penelitian Studi kasus*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018), cetakan ke-2, h. 51-52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah buku-buku bacaan.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis, menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu :¹⁷

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.
- b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, yang artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.
- c. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.
- d. Angket merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan memberikan respons atas dasar daftar pertanyaan tersebut.

Metode Analisis Penelitian

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun

¹⁷ Abdurahmat Fathoni, *op. cit.*, h. 104-112.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Serta menganalisis data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum hal-hal yang bersifat khusus.¹⁸

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap bab dirinci kepada beberapa sub, setiap bab dan sub merupakan kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, masalah, batasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian, serta juga sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI

Pada bab ini membahas lokasi penelitian dan gambaran geografis, demografis, pendidikan dan kebudayaan Nagari Sungai Pua, Kabupaten Agam.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi teori yang berkenaan dengan kewenangan Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan dan dipaparkan hasil penulisan serta analisa hukum yang berkaitan dengan permasalahan mengenai gambaran tentang wewenang Kerapatan Adat Nagari sungai pua menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam dan faktor penghambat wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penulisan pada Bab IV, serta berisi tentang saran sebagai rekomendasi terhadap pihak yang berkepentingan.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****A. Gambaran Umum Kabupaten Agam****1. Sejarah Kabupaten Agam**

Kabupaten Agam merupakan kabupaten yang memiliki sejarah yang panjang dan komplit, baik dalam pemerintahan maupun di bidang adat istiadat. Pada pertengahan abad ke-17 dimana masyarakat Minangkabau telah melakukan perlawanan kepada Belanda yang tertarik akan kekayaan alam di wilayah Minangkabau. Wilayah pemerintahan adat mencakup daerah darek dan rantau. Daerah darek terdiri dari Luhak Tanah Datar yang disebut Luhak Nan Tuo, Luhak Agam yang disebut Luhak Nan Tangah, dan Luhak Limo Puluah Koto yang disebut Luhak Nan Ketek. Daerah rantau terdiri dari daerah rantau hilia yang berada di sekitaran pantai tepi sumatera dan daerah rantau hulu di sekitaran Jambi, Riau, dan Malaysia.¹⁹

Komisariat Pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera yang berkedudukan di Bukittinggi membentuk Peraturan pembentukan daerah Otonom Kabupaten di Sumatera Tengah yang terdiri dari 11 Kabupaten yang salah satunya Kabupaten Singgalang Pasaman dengan Ibukotanya

¹⁹Kabupaten Agam, "Sejarah & Sosiologi", aritikel dari <https://www.agamkab.go.id/Agamkab/profil>. Diakses pada 26 Mei 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bukittinggi yang meliputi kewedanan Agam Tuo, Padang Panjang, Maninjau, Lubuak sikapiang dan Kewedanan Talu.²⁰

Dengan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 171 Tahun 1949, daerah Kabupaten Agam diperkecil sehingga kewedanan Talu dimasukan ke daerah Kabupaten Pasaman, sedangkan beberapa nagari dialihkan ke dalam lingkungan administrasi Kotamadya Bukittinggi. Lalu dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, sehingga daerah ini menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Agam.²¹

Pada tanggal 19 Juli 1993 secara de facto, ibu kota Kabupaten Agam telah berada di Lubuak Basuang yang didasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pemindahan ibu kota Kabupaten Agam dari Kotamadya Bukittinggi ke Kota Lubuak Basuang.²²

2. Kondisi Geografis Kabupaten Agam

Secara Geografis Kabupaten Agam berada pada 000 01' 34'' – 000 28' 43'' LS dan 990 46' 39'' – 1000 32' 50'' BT. Kabupaten Agam adalah kawasan perbukitan, pegunungan dan pesisir yang didominasi oleh

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kawasan lindung dengan basis ekonomi pertanian namun sekaligus kawasan rawan bencana.²³

Luas daerah Kabupaten Agam 2.232,30 km² memiliki 16 kecamatan dan 82 kenagarian. Memiliki batas yakni :²⁴

Utara : Kabupaten Pasaman
 Timur : Kabupaten Limo Pulauah Koto
 Selatan : Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar
 Barat : Samudera Hindia.

Gambar II. 1 Peta Kabupaten Agam



Sumber: Petatematikindo.wordpress.com

Table II.1 Nama Nagari di Kabupaten Agam

No	Kecamatan	Nagari
1	Kec. Ampek Nagari	Nagari Batu Kambing Nagari Bawan Nagari Sitalang Nagari Sitanang
2	Kec. Banuhampu	Nagari Cingkaring

²³ “RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Agam Tahun 2016-2020”, artikel dari http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1501836975Bab_2_Profil_Kab_Agam.pdf. Diakses pada 26 mei 2021, h.2.

²⁴ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Kecamatan	Nagari
		Nagari Kubang Putihah Nagari Ladang Laweh Nagari Padang Lua Nagari Pakan Sinayan Nagari Sungai Tanang Nagari Taluak IV Suku
3	Kec. Baso	Nagari Koto Baru Nagari Koto Tinggi Nagari Padang Tarok Nagari Salo Nagari Simarasok Nagari Tabek Panjang
4	Kec. Canduang	Nagari Bukik Batabuah Nagari Canduang Koto Laweh Nagari Lasi
5	Kec. IV Angkek	Nagari Ampang Gadang Nagari Balai Gurah Nagari Batu Taba Nagari Biaro Gadang Nagari Lambah Nagari Panampuang Nagari Pasia
6	Kec. IV Koto	Nagari Balingka Nagari Guguk Tabek Sarajo Nagari Koto Gadang Nagari Koto Panjang Nagari Koto Tuo Nagari Sianok Anam Suku Nagari Sungai Landia
7	Kec. Kamang Magek	Nagari Kamang Hilir Nagari Kamang Mudik Nagari Magek
8	Kec. Lubuak Basuang	Nagari Geragahan Nagari Kampuang Pinang Nagari Lubuak Basuang Nagari Manggopoh Nagari Kampuang Tengah
9	Kec. Malalak	Nagari Malalak Barat Nagari Malalak Selatan Nagari Malalak Timur Nagari Malalak Utara
10	Kec. Matur	Nagari Lawang Nagari Matua Hilia Nagari Matua Mudik Nagari Panta Pauh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Kecamatan	Nagari
		Nagari Parik Panjang Nagari Tigo Balai
11	Kec. Palembayan	Nagari Ampek Koto Palembayan Nagari Baringin Nagari Salareh Aia Nagari Sipinang Nagari Sungai Puar Nagari Tigo Koto Silungkang
12	Kec. Palupuah	Nagari Koto Rantang Nagari Nan Tujuh Nagari Pagadih
13	Kec. Sungai Puar	Nagari Pasia Laweh Nagari Batagak Nagari Batu Palano Nagari Padang Laweh Nagari Sariak Nagari Sungai Pua
14	Kec. Tanjung Mutiara	Nagari Tiku Selatan Nagari Tiku Utara Nagari Tiku V Jorong
15	Kec. Tanjung Raya	Nagari Bayua Nagari Duo Koto Nagari Koto Gadang Anam Koto Nagari Koto Kaciak Nagari Koto Malintang Nagari Maninjau Nagari Paninjauan Nagari Sungai Batang Nagari Tanjung Sani
16	Kec. Tilatang Kamang	Nagari Gadut Nagari Kapau Nagari Koto Tengah

Sumber: :<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1319529>

Kondisi perekonomian Kabupaten Agam bertumpu ke dalam lima sektor. Pertama, sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya serta perikanan. Kedua, sektor perdagangan, hotel dan restoran. Ketiga, sektor jasa-jasa. Keempat, sektor industri pengolahan. Kelima, sektor bangunan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Temperatur udara di Kabupaten Agam terdiri dari dua macam, yaitu di daerah dataran rendah dengan temperatur minimum 21,70C dan maksimum 22,60C, kelembaban udara yaitu minimum 81,3% dan maksimum 88,4%, kecepatan angin antara 0,1 – 0,3 km/jam dan penyinaran matahari antara 85,3 – 152,9 jam. Sedangkan curah hujan pada tahun 2012 yaitu 2.712,0 mm dan jumlah hari hujan yaitu 227 hari.²⁵

Musim hujan di Kabupaten Agam terjadi antara bulan Januari sampai dengan bulan Mei dan bulan September sampai bulan Desember, sedangkan untuk musim kemarau berlangsung antar bulan Juni sampai dengan bulan Agustus.

3. Kondisi Demografis Kabupaten Agam

Jumlah penduduk Kabupaten Agam berdasarkan Sensus Penduduk 2020 adalah 29.138 jiwa. Kecamatan Lubuk Basung, Ampek Angkek, dan Banuhampu merupakan tiga kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Agam, yaitu berturut-turut 81.351 jiwa, 46.396 jiwa, dan 41.211 jiwa. Sementara itu kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yaitu Kecamatan Malalak dengan 10.644 jiwa²⁶

Berdasarkan Kelompok umur, sebanyak 58,46 persen berada dalam usia produktif yaitu pada rentang usia 15-54 tahun dengan rasio jenis kelamin sebesar 107,03. Kelompok usia 15-19 menempati urutan terbanyak di Kabupaten Agam yaitu sebesar 47.734 jiwa, sementara

²⁵ *Ibid.*, h. 20.

²⁶ BPS Kabupaten Agam, *Kabupaten Agam Dalam Angka 2012*, (Agam: ©BPS Kabupaten Agam, 2021), h. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah penduduk menurut kelompok umur paling sedikit berda pada kelompok usia 70-74 tahun, yaitu sebanyak 12. 517 jiwa.²⁷

Selama tahun 2020, tercatat sebanyak 779 jiwa laki-laki dan 1.207 jiwa perempuan yang terdaftar mencari kerja pada Dinas Pananaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam. 1.618 jiwa diantaranya merupakan tamatan SMA sederajat. Sebagian besar pencari kerja berada pada rentang usia 20-29 tahun, yaitu sebanyak 1.039 jiwa.²⁸

B. Gambaran Umum Nagari Sungai Pua

Nagari Sungai Pua terletak di Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Nama Sungai Pua berasal dari kata Batang yang berarti sungai sedangkan Pua adalah nama pohon yang tumbuh disepanjang pinggir batang atau sungai yang membelah kampung Lidah Api sampai Cingkariang. Saat ini sungai tersebut telah mati, bekasnya demikian curam dan lebar menandakan derasny arus air yang pernah mengalir di sungai tersebut. Di pinggir sungai tersebut tumbuh Batang Pua yang tingginya bervariasi sekitar 50 cm sampai 70 cm. Berwarna putih keungu-unguan sehingga membentuk suatu pemandangan yang indah. Sehingga nama di sekitar daerah tersebut Sungai Pua.²⁹

Pada tahun 1909, para pemuda Sungai Pua yang terdiri dari kaum adat, agama dan cendikiawan pergi mendalami ajaran agama islam ke padang jangang, Kabupaten Limo Pulau Koto yang dipimpin oleh Syech Abbas

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, h. 56.

²⁹ Nagari Sungai Pua, "Sejarah Nagari", artikel dari <https://nagarisungaipua.org/sejarah-nagari-sungai-pua/>. Diakses pada 27 Mei 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdullah, sehingga pola pikir dan kehidupan masyarakat Sungai Pua, Penuh dengan dinamika, kritis dan logis, serta taat adat, yang telah menjadi pakaian orang Sungai Pua.³⁰

Pada bulan Juli tahun 1960, dilakukan penyatuan dua nagari yang dipimpin oleh dua Angku Palo, yaitu Angku Palo Limo Suku dan Angku Palo Kapalo Koto yang bersepakat menyatukan nagari yaitu Nagari Sungai Pua. Dengan Walinagari pertama adalah U. Datuak Garang yang membawahi lima jorong, yaitu :³¹

- a. Jorong Limo Suku
- b. Jorong Tengah Koto
- c. Jorong Kapalo Koto
- d. Jorong Limo Kampuang
- e. Jorong Galuang

1. Kondisi Geografis Nagari Sungai Pua

Gambar II. 2 Peta Nagari Sungai Pua



Sumber : nagarisungaipua.org

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara geografis nagari Sungai Pua terletak pada posisi $100^{\circ} 22'$ – $100^{\circ} 250'$ BT dan $00^{\circ} 77' - 00^{\circ} 21'$ LS. Dengan batas – batas, yakni :³²

Utara	:	Nagari Kubuang Putih
Selatan	:	Nagari Sariak
Timur	:	Nagari Bukik Batabuah
Barat	:	Nagari Cingkariang

Luas wilayah Nagari Sungai Pua adalah 1.213,9 Ha, yang terdiri dari lima jorong dengan luas masing-masing jorong sebagai berikut :

Table II. 2 Luas Wilayah Jorong di Nagari Sungai Pua

NO	Jorong	Luas Wilayah	Persentase
1	Limo Suku	399 Ha	32,87%
2	Tengah Koto	191 Ha	15,73%
3	Kapalo Koto	217 Ha	17,88%
4	Limo Kampuang	206 Ha	16,97%
5	Galuang	200,9 Ha	16,55%
Jumlah		1.213,9 Ha	100%

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Sungai Pua Tahun 2021

2. Kondisi Demografis Nagari Sungai Pua

Jumlah penduduk Nagari Sungai Pua pada tahun 2019 adalah 14.073 dengan 3.738 kepala keluarga. Jumlah penduduk terbesar terdapat di jorong Limo Suku dengan jumlah penduduk 6.057 jiwa (43.02%) dari seluruh jumlah penduduk Nagari Sungai Pua. Jumlah penduduk terdapat di Jorong Galuang dengan jumlah penduduk 1.156 jiwa (8,21%).³³

³² Pemerintah Nagari Sungai Pua, *Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Sungai Pua Tahun 2021*, (Sungai Pua: Pemerintah Nagari Sungai Pua, 2021), h.1.

³³ *Ibid.*, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table II. 3 Jumlah Penduduk Nagari Sungai Pua

No	Jorong	Jumlah Keluarga	Persentase	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Limo Kampuang	680	18.24 %	2.414	17.16 %
2	Kapalo Koto	825	22.50 %	3.072	21.82 %
3	Tangah Koto	403	10.39 %	1.379	9.79 %
4	Limo Suku	1.487	39.55 %	6.057	43.02 %
5	Galuang	343	9.32 %	1.156	8.21 %
Jumlah		3.738	100 %	13.953	100%

Sumber :Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Sungai Pua Tahun 2021

3. Kondisi Topografi Nagari

Nagari Sungai Pua Mempunyai Topografi yaitu kemiringan, ketinggian, dan morfologi daratan, wilayah pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah. Nagari Sugai Pua terletak pada daerah relatif yang bergelombang dan berbukit yang memiliki kemiringan tanah yang berkisar antara 5-40% bahkan ada yang lebih dari 40%.

Suhu rata-rata Nagati Sungai Pua berkisar 15.3 C – 24.4 C dan kelembaban udara sekitar 81.6 % - 90.6 %. Sedangkan curah hujan cukup tinggi pertahun 4500mm/tahun tanpa bulan kering, curah hujan tertinggi bulan Agustus sedangkan curah hujan terendah bulan Februari.³⁴

Darikondisi topografi yang ada di Nagari Sungai Pua akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan ketersediaan lahan. Penggunaan lahan di Nagari Sungai Pua di dominasi areal pertanian (sawah ladang), perumahan, sarana prasarana, perkebunan hutan dan bentuk lainnya :

³⁴ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table II. 4 Luas Lahan Nagari Sungai Pua

No	Jorong	Sawah	Ladang	Hutan	Kolam	Total
1	Tangah Koto	152.5 Ha	15 Ha	0 Ha	0.3 Ha	167.8 Ha
2	Kapalo Koto	132.5 Ha	15.60 Ha	3 Ha	1.9 Ha	153 Ha
3	Limo Suku	86.6 Ha	45.00 Ha	6.2 Ha	1.8 Ha	139,6 Ha
4	Limo Kampuang	75.0 Ha	22.00 Ha	0 Ha	38.4 Ha	135,4 Ha
5	Galuang	80.0 Ha	2.80 Ha	0 Ha	77.9 Ha	160,7 Ha

Sumber: <https://nagarisungaipua.org/sumber-daya-alam/>

Dilihat dari tabel di atas hasil produksi yang tertinggi adalah jenis kubis bunga dan yang terendah adalah bawang merah atau putih hasil komoditas ini cenderung terjadinya peningkatan produktifitas dari tahun ke tahun sehingga memiliki potensi yang besar.³⁵

Sektor pariwisata merupakan salah satu bagian yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Nagari Sungai Pua. Terdapat berbagai objek wisata yang sangat berpotensi untuk dikembangkan karena keindahan alam dan udara yang sejuk, objek wisata tersebut :

- a. Wisata Alam Badoray
- b. Wisata Olah Raga
- c. Agro Wisata

4. Sarana Pendidikan Nagari

Kondisi Pendidikan di Nagari Sungai Pua sudah memadai dengan adanya sekolah dari tingkat PAUD sampai SMA dan juga sekolah keagamaan. Semua anak-anak telah mengikuti program pendidikan pemerintah sehingga sebagian masyarakat mengutamakan anak-anaknya untuk sekolah negeri. Untuk masyarakat yang faktor ekonominya kurang di bantu pihak nagari untk melanjutkan pendidikan.

Adapun sarana pendidikan yang ada di Nagari Sungai Pua adalah :

³⁵ Nagari Sungai Pua, *loc.cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table II. 5 Sarana Pendidikan Nagari Sungai Pua

NO	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	3
2	Taman Kanak-Kanak	5
3	Sekolah Dasar	9
4	Sekolah Menengah Pertama	2
5	Sekolah Menengah Atas	1
6	Pondok Pesantren	2
7	TPA	5

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Sungai Pua Tahun 2021

5. Visi Misi Nagari Sungai Pua

Visi Nagari Sungai Pua Periode 2017-2023:

“Terwujudnya Nagari Sungai Pua Sebagai Nagari Yang Mandiri, Maju dan Beriman (Bersih, Indah, dan Nyaman) Untuk Kesejahteraan Masyarakat Berlandaskan ABS-SBK”

Misi Nagari Sungai Pua Periode 2017-2023:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan transparan.
- b. Pembangunan yang berkelanjutan serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat.
- c. Meningkatkan kehidupan beragama dan norma adat istiadat dalam kerangka adat salingka nagari.
- d. Menggerakan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan serta penguatan lembaga ekonomi nagari.
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan berkarakter.
- f. Peningkatan peran masyarakat untuk pembangunan nagari.

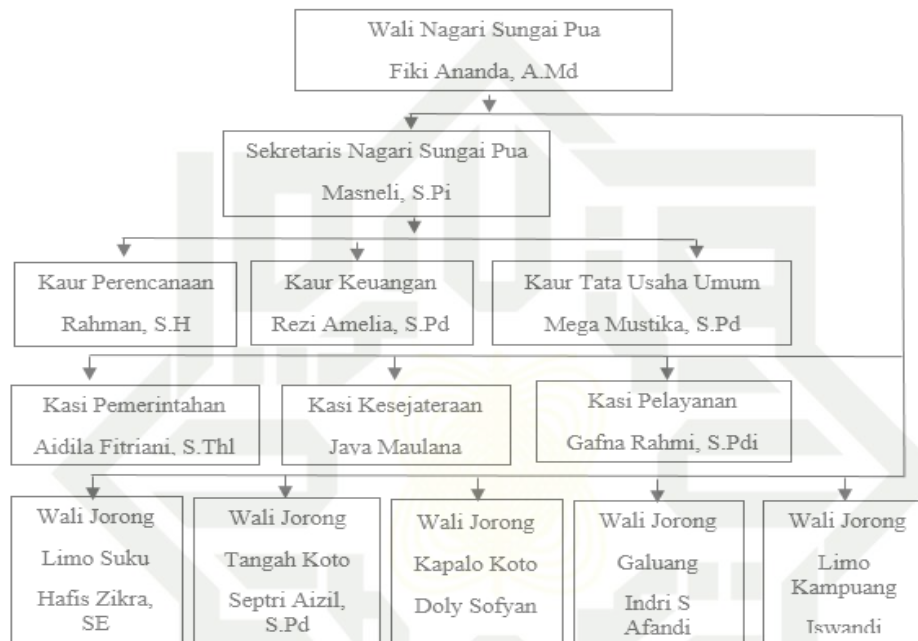
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sturuktur Organisasi Pemerintahan Nagari Sungai Pua

1. Struktur Pemerintah Nagari Sungai Pua Periode 2017-2023

Gambar II. 3 Bagan Pemerintah Nagari Sungai Pua



Sumber: Kantor Nagari Sungai Pua

2. Struktur Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua

Table II. 6 Keanggotaan Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua

Majelis Pertimbangan	:	H.A.S Dt. Sinaro Nan Gadang M. Dt. Rajo Malenggang N. Dt. Bungsu Dj. Dt. Sidubalang Nan Barantai
Ketua	:	H. H. Dt. Bagindo
Ketua I	:	S.W. Dt. Bungsu
Ketua II	:	J. Dt. Pangeran
Sekretaris	:	A.Dt. Sinaro Intan
Bendahara	:	Z. Dt. Tunaro Nan Batuah
Urusan Perdamaian Adat	:	H. B. Dt. Bijo Rajo Nan Putih
Urusan Pembinaan dan Pengembangan Adat	:	H.T. Dt. Paduko
Urusan Seni dan Budaya	:	L. Dt. Mangkuto Saripado
Urusan Kekayaan Nagari	:	A.Dt. Nan Tinggi Nan Batuah

Sumber: Kantor Nagari Sungai Pua



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat

1. Hukum Adat

Wilayah Indonesia yang luas memiliki berbagai macam suku dan budaya yang berbeda-beda di setiap daerah. Setiap daerah tersebut memiliki adat istiadat dan hukum adatnya tersendiri yang dilaksanakan secara turun-temurun, ini merupakan kearifan lokal yang sejatinya tumbuh dan berkembang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah adat yang berasal dari bahasa Arab, yang memiliki arti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang atau sekelompok orang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah:³⁶

- a. Adanya tingkah laku seseorang
- b. Dilakukan terus menerus
- c. Adanya dimensi waktu
- d. Di ikuti oleh orang lain.

Hukum adat adalah salah satu sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial di Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum dalam masyarakat. Karena peraturan- peraturan

³⁶ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Aceh: Unimal Press, 2016), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini tidak tertulis dan berkembang, hukum adat memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai sekelompok orang yang menjadi persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal dan atas dasar keturunan yang sama.³⁷

Hukum adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.³⁸ Hukum adat ini biasanya tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetap ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum. Di Indonesia hukum adat menjadi salah satu sumber hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Hukum adat ini mempunyai perbedaan di setiap daerah yang memiliki ciri khas masing-masing dalam sistem dan aturannya, selain itu hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, masyarakat yang memakai hukum adat ini di sebut masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan di dalamnya ada sistem kekuasaan dan secara

³⁷ Sajuti Thalib, Receptio A Contrario, *Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h.9.

³⁸ Bushar Muhammad, 1983, *Asas Asas hukum Adat (suatu Pengantar)*, (Jakarta: Pradnya Paratama, 1983 h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud,³⁹ di mana para anggota kesatuan hidup dalam masyarakat yang merupakan kodrat yang para anggotanya tidak berpikir untuk membubarkan ikatan tersebut atau melepaskan diri dari ikatan itu. Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola perilaku yang sama, di mana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap.⁴⁰

Masyarakat hukum adat ini pada umumnya mempunyai tiga bentuk struktur yaitu pertama, genealogis merupakan suatu kesatuan masyarakat yang teratur dimana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari suatu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) maupun secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Kedua, teritorial merupakan masyarakat yang tetap dan teratur yang anggota-anggota masyarakatnya terkait pada suatu daerah hukum kediaman tertentu baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan. Ketiga, teritorial genealogis merupakan suatu kesatuan masyarakat yang tetap teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman

³⁹ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), h. 2.

⁴⁰ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada suatu daerah tertentu melainkan juga terikat pada hubungan pertalian darah atau kekerabatan.⁴¹

Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia Belanda, masyarakat genealogis tersebut dapat dibedakan yaitu pertama, masyarakat yang patrilineal adalah yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan bapak (garis laki-laki), sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan. Kedua, masyarakat yang matrilineal adalah yang susunan masyarakatnya ditarik berdasarkan garis keturunan ibu (garis wanita), sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan. Ketiga, Masyarakat yang bilateral atau parental adalah yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu bersama-sama.⁴²

2. Hukum Adat di Minangkabau

Minangkabau merupakan salah satu bentuk masyarakat hukum adat matrilineal terbesar yang ada di Indonesia. Secara umum, perkataan Minangkabau mempunyai dua pengertian, pertama Minangkabau sebagai tempat berdirinya kerajaan Pagaruyung. Kedua, Minangkabau sebagai salah satu kelompok etnis yang mendiami daerah tersebut. Hukum adat minangkabau adalah salah satu dari seluruh hukum adat yang di Indonesia yang hidup dan harus berkembang.⁴³

⁴¹ Hayatudin, *Hukum “Masyarakat Hukum Adat”*, artikel dari http://khatyudin/2012/12/masyarakat-hukum-adat_5.html. Diakses pada tanggal 12 Juni 2021.

⁴² Abi Asmana, “Masyarakat Hukum (Persekutuan Hukum) Genealogis”, artikel dari http://legalstudies7/2016/01/masyarakat-hukum-persekutuan-hukum_14.html. Diakses pada tanggal 14 Juni 2021.

⁴³ Suardi Mahyuddin dan Rustam Rahman, *Hukum Adat Minangkabau Dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao*. (Jakarta: CV. Citatama Mandiri, 2002), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Falsafah atau dasar pandangan hidup masyarakat Minangkabau adalah “*adat bersadi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Ini merupakan dasar hukum adat dalam masyarakat Minangkabau, jika suatu adat bertentangan dengan syariat dan al-quran maka adat tersebut terhapuskan. Adat di Minangkabau itu terbagi empat, yakni:⁴⁴

a. Adat yang sabana adat

Yang dimaksud dengan adat yang sebenarnya adat ialah adat yang asli, yang berubah, yang tak lapuk oleh hujan yang tak lekang oleh panas. Kalau dipaksa dengan keras niengubahnya, ia dica/mik iudak mati, diasak iudak layua (dicabut tidak mati. dipindahkan tidak layu). Adat yang lazim diungkapkan dalam pepatah dan petiti ini, seperti hukum alam yang merupakan falsafah hidup mereka.

b. Adat-istiadat

Yang dimaksud dengan adat-istiadat ialah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat umum atau setempat, seperti acara yang bersifat seremoni atau tingkah laku pergaulan yang bila dilakukan akan dianggap baik dan bila tidak dilakukan tidak apa-apa.

c. Adat yang diadatkan

Yang dimaksud adat yang diadatkan ialah peraturan yang di buat oleh nagari atau sekelompok kaum adat untuk melaksanakan adat nan sabana adat. Adat ini disusun oleh penghulu dan para tokoh melalui musyawarah mufakat nagari.

⁴⁴ A.A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru Adat dan Budaya Minangkabau*, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1984), h. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Adat yang teradatkan

Yang dimaksud dengan adat yang teradat ialah peraturan ,yang dilahirkan oleh mufakat atau konsensus masyarakat yang memakainya, seperti yang dimaksud mamangan: *Patah tumbuh, hilang berganti* (patah tumbuh, hilang berganti). Ibarat pohon yang patah karena bencana. maka ia akan dapat tumbuh lagi pada bekas patahannya. Kalau ia hilang. ia diganti pohon lain pada bekas tempatnya hilang karena pohon itu perlu ada untuk keperluan hidup manusia.

Masyarakat Minangkabau yang berdasarkan kekerabatan menurut garis keturunan ibu memiliki hukum adat yang berbeda dengan masyarakat hukum adat lainnya di Indonesia. Kekerabatan ini juga yang akan menjadi faktor penentu hak dan kewajiban seseorang dalam pembagian harta waris dalam masyarakat hukum adat. Oleh karena di satu pihak seringkali bermacam-macam kriteria yang dapat dijadikan dasar bagi hak-hak dan kewajiban-kawajiban tersebut.⁴⁵

Persekutuan hukum yang menjadi suatu kesatuan yang merupakan dasar dari organisasi masyarakat Minang yaitu *paruik*. Satu keluarga besar (famili) disebut sebuah paruik. Jika anggota sebuah paruik bertambah maka paruik tadi membeleh diri menjadi kesatuan yang berdiri sendiri yang bernama jurai. Di samping itu dari perukumpulan persekutuan hukum tersebut lahirlah istilah suku yang merupakan lingkung pertalian darah yang dilihat dari garis ibu atau *matrilineal*. Dalam perkembanganya

⁴⁵ Soekanto Dan Soerjano Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa suku bersama-sama menepati suatu daerah tertentu sehingga muncullah faktor teritorial yang bernama *nagari*.⁴⁶

B. Teori Nagari dan Desa

1. Pengertian Nagari

Nagari adalah persekutuan hukum yang berdiri di atas dasar faktor genealogi dan faktor teritorial. Datuak Katamangguangan dan Datuak Parpatian Nan Sabatang telah menetapkan *adat yang di adatkan* yang salah satu dari bagian tersebut adalah *Nagari nan ampek*, yang dimaksudkan ialah:⁴⁷

a. Teratak

Teratak ialah tempat kediaman yang letaknya jauh terpencil dari kampung atau nagari. Terjadinya teratak karena orang membuka lahan di tengah hutan dan didalam hibungan keluarga mereka masih memakai mamak dan penghulu dari kampung asal mereka.

b. Dusun

Dusun merupakan perkembangan dari teratak yang berkembang dan rumah-rumah baru di dalamnya ada minimal 3 suku yang menghuni wilayah tersebut. Warga dusun ini masih bermamak dan perpenghulu ke kampung asal mereka.

⁴⁶ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h. 8-9.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 22-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Koto dan Nagari

Koto merupakan pusat dari kumpulan dari beberapa dusun yang telah memiliki 4 suku didalamnya. Mereka telah membuka persawahan dan lahan untuk berladang. Lalu beberapa koto yang berdekatan membentuk sebuah nagar

Setelah terbentuknya sebuah nagari yang memiliki wilayah dan penduduk. Mereka menentukan bentuk pemerintahan berdasarkan adat Bodi Chaniago atau adat Koto Piliang. Didalam lingkung adat yang pertama, pemerintahan nagari diselenggarakan oleh penghulu-penghulu andiko di dalam suatu musyawarah yang di namakan kerapatan nagari yang didasarkan dengan pepatah “*duduak samo randah tagak samo tinggi*” dan “*mambasuik dari bumi*”.

Lingkungan adat Koto Piliang kita menjumpai sebuah keluarga atau paruik yang di pimpin seorang penghulu Andiko, akan tetapi paruik-paruik tersebut bergambung dan memilih seseorang menjadi penghulu suku. Lalu penghulu suku ini dan penghulu suku lainnya bersama-sama nagari sebagai *datuak nan kaampek suku*. Kemudian mereka memilih seorang datuak pucuk utuk menjadi pucuk dan memerintah bersama dengan penghulu suku dan penghulu andiko. Kedudukan penghulu nya didasarkan pepatah “*bajanjang naiak batanggo turun*” dan “*nan titiak dari langik*”.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*, h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menjalankan nagari penghulu dibantu dengan tiga orang lainnya yaitu, *manti*, *malin* dan *dubalang* mereka di sebut “*urang nan ampek jinih*”. Ke empat unsur tersebut memiliki tugasnya masing-masing yaitu :

- a. Penghulu sebagai seorang yang memimpin nagari.
- b. Manti sebagai tangan kanan penghulu.
- c. Malin sebagai seorang alim ulama.
- d. Dubalang sebagai seorang penjaga keamanan.

Menurut Pasal 118 jo. Pasal 128 I.S (Undang-Undang Dasar Hindia Belanda), penduduk asli dibiarkan hidup dibawah langsung dari kepala-kepalanya sendiri. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan dalam IGOB (*Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten*) LN 1938 No. 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939. Nama dan jenis persekutuan masyarakat asli ini adalah persekutuan Bumi Putera.⁴⁹

Awal kemerdekaan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, yang dijelaskan dalam angka II “ Dalam Teritorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 “*Zelfbesturendelandschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*” seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang. Daerah-daerah tersebut memiliki susunan asli dan dianggap sebagai daerah yang istimewa.⁵⁰

Awal kemerdekaan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, yang dijelaskan dalam angka II “ Dalam Teritorial Negara Indonesia

⁴⁹ HAW. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.4.

⁵⁰ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat kurang lebih 250 *"Zelfbesturendelandschappen"* dan *"Volksgemeenschappen"* seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang. Daerah-daerah tersebut memiliki susunan asli dan dianggap sebagai daerah yang istimewa.

Kesatuan politik dan geografis yang utama di Minangkabau Tradisional adalah Nagari yang terdiri atas suatu nagari yang luas dan besar dengan beberapa pemukiman kecil yang merupakan tempat tinggal.⁵¹ Ukuran nagari berbeda-beda satu sama lain, baik luas geografisnya maupun jumlah penduduknya.

Pemerintahan Nagari menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Pasal 1 ayat 2 adalah *"penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia"*. Ini merupakan dasar yang menjadikan dasar penyelenggaran pemerintahan Nagari di wilayah Provinsi Sumatera Barat.⁵²

Sedangkan pada Pasal 1 ayat 2 *"Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah mufakat secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara'*

⁵¹ Elizabeth E. Graves, *Asal Usul Elit Minangkabau Modern – Respon terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*, alih bahasa oleh Novi Andri, et.al., (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Pusat Perbukuan, 2007), h. 30.

⁵² Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, tentang Nagari, Pasal 1 Ayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat".⁵³ Dalam nagari terdapat beberapa bagian wilayah yang di sebut Jorong, korong dan kampung. Dalam pasal 1 ayat 7 "*jorong/korong/kampung bagian dari wilayah Nagari*".

Setiap nagari harus memiliki kelembagaan nagari untuk terlaksannya penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kelembagaan nagari ini memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Pasal 5 menyebutkan kelembagaan Nagari terdiri atas:⁵⁴

a. Kerapatan Adat Nagari

Kerapatan Adat Nagari disingkat KAN adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kandung, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari.

b. Pemerintah Nagari

Pemerintah Nagari adalah Kapalo Nagari atau nama lainnya dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

⁵³ Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, tentang Nagari, Pasal 1 Ayat

⁵⁴ Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, tentang Nagari, Pasal 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Peradilan Adat Nagari

Peradilan Adat Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga penyelesaian sengketa masyarakat di Nagari berdasarkan adat salingka Nagari yang bersifat mediasi

Sebelum tahun 1914, tiap-tiap nagari diperintah oleh penghulu kepala, penghulu suku, dan penghulu Andiko. Dan kelarasan diperintah oleh tuanku laras. Peraturan-peraturan yang akan dijalankan oleh pemerintah terlebih dahulu dibicarakan oleh penghulu-penghulu dalam nagari, kemudian barulah peraturan itu dijalankan.⁵⁵ Menurut sepanjang adat, tanggungan penghulu sangat lah berat dan kekuasaannya sangat besar dalam nagari sehingga sering disebutkan dalam pasambahan, “penghulu basa batuah” karena mereka yang menjadi sendi keamanan nagari.⁵⁶

Setelah pangkat tuanku laras dan pangkat penghulu kepala ditiadakan pada bulan Mei 1914, pada masa Tuan Gubernur Balot memerintah di Sumatera Barat, nagari-nagari diurus oleh penghulu-penghulu yang dikepalai oleh kepala nagari berdasarkan ordonansi nagari.⁵⁷

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 penyelenggaraan pemerintahan desa atau nagari berdasarkan asas :

a. Kepastian Hukum

⁵⁵ Azizah Etek, et.al., *Kelah Sang Demang Jahja Datoek Kajo*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2008), Cet. 1, h.23.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 24.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tertip Penyelenggaraan Pemerintahan
- c. Tertip keperntinagan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proposionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektifitas dan efesiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman
- k. Partisipatiff

2. Pengertian Desa

Desa berasal dari bahasa India yakni “Swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang cukup jelas. Di Indonesia dapat ditemui banyak sekali kesatuan masyarakat dengan peristilahnya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang atau Wanua di Minahasa.⁵⁸

Dalam sistem pemerintahan Indonesia terdapat pemerintahan desa, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan daerah. Indonesia mengatur desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebelumnya desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

⁵⁸ Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Pekanbaru: ZANAFA PUBLISHING, 2015)., h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1965 tentang Desa Praja dan Kedua desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.⁵⁹

Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan Arti Desa “*Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*”

Berdasarkan pengertian atau definisi terkait tentang desa seperti yang dijelaskan dan diuraikan di atas, maka dapat dinyatakan ada beberapa hal yang perlu diketahui dan dipahami tentang desa, yakni:⁶⁰

- a. Desa terdiri dari Desa dan Desa Adat
- b. Desa dapat disebut dengan nama lain.
- c. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum
- d. Desa memiliki batas wilayah
- e. Desa berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
- f. Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
- g. Pengaturan desa didasarkan pada prakarsa masyarakat
- h. Pengaturan desa didasarkan pada hak asal usul dan hak tradisional

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*, h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Desa diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia dilaksanakan oleh unsur lembaga Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa berfungsi dalam proses penyelenggaraan berbagai bentuk kebijakan dari pemerintah tingkat atasnya dan berbagai kebijakan desa yang dibuat oleh desa itu sendiri, melalui proses musyawarah mufakat di tingkat desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi untuk menetapkan berbagai bentuk dari peraturan desa yang ditetapkan bersama-sama dengan kepala desa dan menyampaikan aspirasi masyarakat.⁶¹ H 42-42

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keberadaan dari suatu desa dan unsur pemerintahan desa juga dapat berkedudukan di Kota selain dari pada berkedudukan di kabupaten. Pada Pasal 5 “*Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota*”. Jenis Desa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, yakni:

- a. Desa terdiri dari atas desa dan desa adat
- b. Penyebutan desa atau desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Kewenangan desa telah diatur dengan jelas dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa:

“ Kewenangan Desa meliputi hal-hal sebagai berikut:

⁶¹ *Ibid.*, h. 42-43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- b. Kewenangan Bersekala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewenangan Pemerintahan Nagari

Pemerintahan Nagari atau Desa Adat yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 103 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 16 menjelaskan Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan Desa Adat berdasarkan susunan asli
- b. Pengaturan dan pegurusan ulayat atau wilayah adat
- c. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat
- g. Pengembanagan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

4. Dasar Hukum Pemerintahan Nagari

Pemerintahan Nagari yang merupakan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul diatur dan disepakati dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia, yaitu :

- a. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang penetapan dan Penegasan Batas Desa
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
- h. Peraturan daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Peraturan Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan pelestarian Nilai Budaya Minangkabau

C. Teori Kewenangan dan wewenang

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁶²

Dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).⁶³

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya

⁶² Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h.78.

⁶³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 35-36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*).⁶⁴

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum public, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distrubi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁵ Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Di dalam negara hukum dikenal atas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan keneharaan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem konstitunental. Philipus M.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 77.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu ; atribusi, delegasi, mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.⁶⁶

Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.⁶⁷

D. Kerapatan Adat Nagari

Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk merupakan wadah dalam rangka membina, memperdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai norma, kaedah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁶⁸

⁶⁶ Philipus M. Hadjon, “*Wewenang*”, (Makalah: Universitas Airlangga, 2014) Surabaya, 112.

⁶⁷ Ibid., h .113.

⁶⁸ HAW. Widjaja., op. cit., h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nagari yang dirus oleh penghulu-penghulu yang menjadi anggota kerapatan adat nagari. Sejak dulu, apapun pekerjaan yang akan dilakukan, penghulu-penghulu tersebut harus melakukan mufakat. Selanjutnya mereka melakukan musyawarah dengan cerdik pandai dalam nagari.⁶⁹

Pemerintahan adat nagari atau juga disebut Kerapatan adat, mempunyai dua pengertian. Menurut Guyt, kerapatan adat di artikan seluruh kerapatan yang ada di suatu nagari baik mulai kerapatan paruk sampai dengan kerapatan tertinggi. Dalam khasnah literatur terutama dalam jurisprudensi kerapatan adat mempunyai pengertian yang lain, yaitu kerapatan dari suku yang memerintah satu nagari yang dari dahulu kala telah menyelenggarakan otonomi menurut adat dalam satu nagari.⁷⁰

Masyarakat hukum adat pada awalnya berisidang di tempat terbuka yaitu di bawah batang kayu besar. Kemudian setelah begitu banyak orang yang harus dihadirkan, mereka mendirikan balai-balai adat. Di Minangkabau gaya arsitektur balai adat di setiap nagari terpengaruh pada kelarasan yang mereka anut. Menurut adat Koto Piliang, tuang rapat dalam balai itu tidak sama tinggi, sedangkan adat Bodi Chaniago kesemua anggota-anggota rapat akan duduk sama tinggi.⁷¹ Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

⁶⁹ Azizah Etek, et.al., op. cit., h. 21.

⁷⁰ Iskandar Kemal, *Pemerintahan Nagari Minangkabau & Perkembangannya tentang Kerapatan Adat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 135.

⁷¹ *Ibid.*, h. 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susunan kerapatan adat nagari tergantung kepada adat yang dipakai. Apakah menurut sistem adat Koto Piliang atau menurut sistem adat Bodi Chaniago. Menurut sistem adat Koto Piliang yang dipimpin datuak Katumangguangan, kerapatan adat dipimpin oleh penghulu pucuk yang memegang kekuasaan tertinggi, kedudukannya tetap dan tidak bergilir. Adat ini dinamakan adat Rajo-Rajo. Sedangkan menurut adat Bodi chanigo yang dipimpin Datuak Parpatiah Nan Sabatang berlaku pepatah, “kemenakan barajo kemamak, mamak barajo kepenghulu, penghulu barajo kemufakat” yang memimpin kerapatan adat nagari yaitu salah satu seorang dari penghulu empat suku yang secara bergeliran menjadi ketua dari kerapatan adat.⁷²

Menurut Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari pada Pasal 1 angka 6 menyebutkan, “*Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kandung, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari.*”

Kerapatan Adat Nagari dalam peraturan ini mengatur tugas dan wewenang dalam Pasal 7:

(1) Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :

⁷² Ibid., h. 138.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari;
- b. menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari; dan
- c. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

(2) Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat;
- b. menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari;
- d. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari; dan
- e. melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari.

Kerapatan Adat Nagari di beri keluasaan untuk menentukan masa jabatannya sesuai Adat Salingka Nagari, Seperti yang dituangkan dalam Pasal 8:

- (1) Masa Jabatan Kerapatan Adat Nagari ditentukan berdasarkan Adat Salingka Nagari.
- (2) Dalam hal Adat Salingka Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menentukan masa jabatan Kerapatan Adat Nagari, maka masa jabatan Kerapatan Adat Nagari ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Kata demokrasi atau democracy dalam bahasa Inggris di adaptasi dari kata *demokratie* dalam bahasa Prancis pada abad ke-16. Akan tetapi, asal kata sebenarnya berasal dari bahasa Yunani *demokratia*, yang diambil dari kata *demos* berarti rakyat, *kratos* berarti kekuasaan (memerintah).⁷³

Menurut tafsir R. Kranenburg dalam bukunya “*inleiding in de vergelijkende staatsrechtwetenschap*”, perkataan demokrasi yang terbentuk dari kata Yunani di atas, maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat. Menurut M. Durverger, demokrasi cara pemerintahan di mana golongan yang memerintah dan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah. Artinya dalam suatu pemerintahan negara setiap orang memiliki hak untuk memerintah dan diperintah.⁷⁴

Demokrasi menurut Montesque, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.

⁷³ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 200.

⁷⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis-Jenis Demokrasi

a. Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung merupakan demokrasi yang memungkinkan semua warga negara tanpa melalui pejabat yang dipilih atau diangkat dapat ikut dalam pembuatan keputusan negara.⁷⁵

Direct Democracy atau demokrasi langsung adalah sistem pemerintahan yang diterapkan setelah refomasi yang terjadi di beberapa city-state (negara kota) dan Yunani sekitar pertengahan abad kelima sebelum masehi. Sebelumnya bersifat aristokrasi, oligarki, monarki, atau tirani, berubah menjadi satu sistem yang melibatkan secara langsung sejumlah besar "warga" . dalam pembuatan hukum, penentuan kebijakan penting, dan juga memilih orang yang akan memerintah atas nama mereka.⁷⁶

b. Demokrasi Tidak langsung

Demokrasi tidak langsung menggunakan sistem perwakilan, setiap partai politik yang memenuhi syarat untuk mendapat kursi, menepatkan wakilnya dalam badan legislatif yang jumlahnya tergantung pada persentase perolehan suara tingkat nasional.⁷⁷

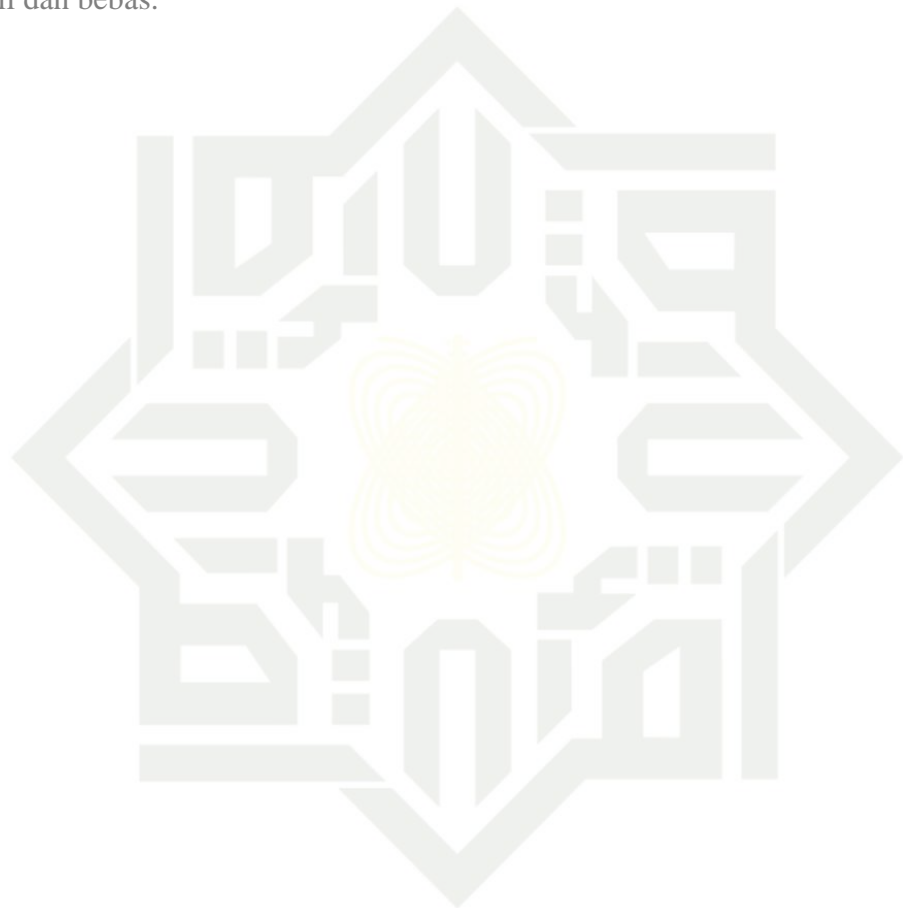
Representive Democracy atau disebut juga demokrasi perwakilan merupakan alternatif dari penerapan demokrasi langsung yang di anggap semakin sulit untuk diterapkan. Demokrasi perwakilan ini dianggap cocok

⁷⁵ Sunarso, *Membedah Demokrasi (sejarah, konsep, dan implementasi di indonesia)*, Yogyakarta: UNY Press, 2015), h. 12.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 22.

⁷⁷ *Ibid.*

menumbuhkan demokrasi dalam masyarakat yang kompleks dan jumlah penduduk yang besar. Setiap warga negara memiliki kekuasaan dasar untuk memilih wakilnya dalam pemerintahan yang dipilih melalui proses pemilihan yang adil dan bebas.⁷⁸



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁸ *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam masih ada beberapa poin yang belum terlaksanakan dan sudah terlaksana dengan baik diantaranya: (i) Kerapatan Adat Nagari tidak memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat, (ii) Kerapatan Adat Nagari menyalurkan aspirasi masyarakat hanya sebatas masalah adat, (iii) Kerapatan adat Nagari melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya nagari dengan baik, (iv) Kerapatan Adat Nagari tidak meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari Kepada Kapalo Nagari (v) Kerapatan Adat Nagari melaksanakan dengan baik melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari.
2. Faktor penghambat wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam diantaranya: (i) Kurangnya Kesadaran Kerapatan Adat Nagari Untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (ii) Minimnya peran pemerintahan provinsi dalam pembinaan Kerapatan adat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nagari, (iii) Perbedaan pandangan dan perubahan kultur masyarakat adat,
- (iv) Kurangnya Anggaran APNag dalam Pengembangan Adat Istiadat.

B. Saran

Untuk terlaksananya wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam sebagai mestinya. Maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan saran yaitu:

1. Agar pemerintah Daerah Sumatera Barat dan pemerintah Kabupaten Agam diharapkan agar memberikan sosialisasi tentang wewenang Kerapatan Adat Nagari dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari bertujuan untuk membina anggota Kerapatan Adat Nagari agar lebih memahami lagi dalam menjalankan wewenangnya.
2. Agar anggota Kerapatan Adat Nagari dan pemerintahan Nagari atau walinagari lebih menjalin hubungan komunikasi yang lebih baik lagi, agar wewenang Kerapatan Adat Nagari berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Chairul. Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Arifanyo. Implementasi Metode Penelitian Studi kasus, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018.
- Atmosudirjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- E. Graves, Elizabeth. Asal Usul Elit Minangkabau Modern – Respon terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX, alih bahasa oleh Novi Andri, et.al., Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Pusat Perbukuan, 2007.
- Etek, Azizah. et.al., Kelah Sang Demang Jahja Datoek Kajo, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2008.
- Fathoni, Abdurahmat. Metode penelitian & teknik penyusunan skripsi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Hajati, Sri. et., al, Buku Ajar Hukum Adat, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Hasyimzoem, Yusnani. et., al, Hukum Pemerintahan Daerah, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Huda, Ni'matul. Ilmu Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Kemal, Iskandar. Pemerintahan Nagari Minangkabau & Perkembangannya tentang Kerapatan Adat, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- M. Hadjon, Philipus. "Wewenang", Makalah: Universitas Airlangga, 2014.
- Mahendra, Yusril Ihza. Dinamika Tatanegara Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Muhammad, Bushar. Asas Asas hukum Adat (suatu Pengantar), Jakarta: Pradnya Paratama, 1983
- Navis, A.A. Alam Takambang Jadi Guru Adat dan Budaya Minangkabau, Jakarta: PT Grafiti Pers, 1984.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Andraha, Taliziduhu. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1981.

Noor, Juliansyah, Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah. Pemerintahan Desa, Pekanbaru: ZANAFAPUBLISHING, 2015.

Sajuti Thalib dan Receptio A Contrario. Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Soekanto Dan Soerjano Soekanto. Pokok-Pokok Hukum Adat, Bandung: Alumni, 1981

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.

Suardi Mahyuddin dan Rustam Rahman. Hukum Adat Minangkabau Dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao, Jakarta: CV. Citatama Mandiri, 2002.

Sunarso, Membedah Demokrasi (sejarah, konsep, dan implementasi di indonesia), Yogyakarta: UNY Press, 2015.

Utomo, Laksanto Hukum Adat, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016

Widjaja, HAW. Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

B. Undang-Undang / Peraturan

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

C. Jurnal

Yunus, "Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau", Volume 6., NO. 2., (2007)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Internet

Abi Asmana, “Masyarakat Hukum (Persekutuan Hukum) Genealogis”, artikel dari http://legalstudies7/2016/01/masyarakat-hukum-persekutuan-hukum_14.html.

Hayatudin, *Hukum “Masyarakat Hukum Adat”*, artikel dari http://khayatudin/2012/12/masyarakathukum-adat_5.html.

Kabupaten Agam, “RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Agam Tahun 2016-2020”, artikel dari http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1501836975Bab_2_Profil_Kab_Agam.pdf.

Nagari Sungai Pua, “Sejarah Nagari”, artikel dari <https://nagarisungaipua.org/sejarah-nagari-sungai-pua/>.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"WEWENANG KERAPATAN ADAT NAGARI SUNGAI PUA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DI NAGARI SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM"* yang ditulis oleh :

Nama : ADIT SEKOFIER
 NIM : 11727102197
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Jumat, 6 Agustus 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
 Asril, SH., MH.

Sekretaris
 Dr. M. Alfi Syahrin, SH., MH

Penguji I
 Peri Pirmansyah, SH., MH

Penguji II
 Lysa Angraini, SH., MH

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un 04/F.1/PP.00.9/2973/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 17 Maret 2021

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ADIT SEKOFIER
NIM : 11727102197
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agama,
Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang
berjudul : PELAKSANAAN WEWENANG KERAPATAN ADAT NAGARI SUNGAIPUA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7
TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DI NAGARI SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag.
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmpptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/39957
T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2973/2021 Tanggal 17 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **ADIT SEKOFIER**
2. NIM / KTP : **11727102197**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN WEWENANG KERAPATAN ADAT NAGARI SUNGAI PUA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DI NAGARI SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM**
7. Lokasi Penelitian : **NAGARI DI NAGARI SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Maret 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
a. Pengutipan harus mencantumkan kepengimpinan pendidikan, peneliti, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau imajinasi suatu masalah.
b. Pengutipan tidak boleh menimbulkan kerugian atau pelanggaran hak cipta.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta m...
State Islamic University of Sumatra
Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id>

UN SUSKA RIAU



SURAT KETERANGAN

Nomor : 570 / 575 - PERIZ/DPM&PTSP/III/2021

Rekomendasi Penelitian

Menimbang :

- Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
- Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Mengingat :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan :

Sesuai Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.II/Pp.00.9/2973/2021 Tanggal 17 Maret 2021 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Adit Sekofier
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 29-12-1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Panorma No.33
Nomor Kartu Identitas : 1375012912970001
Judul Penelitian : Pelaksanaan Wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam
Lokasi Penelitian : Agari Sungai Pua Kabupaten Agam
Jadwal Penelitian : 17 Maret 2021 s.d 17 Agustus 2021
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
- Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
- Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 17 Maret 2021

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Disandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT

MASWAR DEDI, A.P.M.SI
NIP. 197406181993111001



Tembusan:

- Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
- Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.





PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN SUNGAI PUA
NAGARI SUNGAI PUA

Jln. Raya Sungai Pua Tengah Koto 26182 Telp. (0752) 691211 Website : www.nagari-sungaipua.com e-mail : info@nagari-sungaipua.com

Sungai Pua 21 Juli 2021

12 Dzulhijjah 1442 H

No : 420/118/NSP/VII - 2021
Lamp :
Hal : Izin Penelitian


Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau
Di
Pekanbaru

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan nomor Un.04/F.I/PP.00.9/2973/2021 Perihal Mohon Izin Riset yang dilaksanakan oleh

Nama : ADIT SEKOFIER
NIM : 11727102197
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Nama yang tersebut diatas benar telah Melaksanakan dan mengumpulkan data Penelitian untuk menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Pelaksanaan Wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam**" di Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

Demikian Surat ini disampaikan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.


Wali Nagari Sungai Pua
Fiki Ananda A.Md

Tembusan :

1. Camat Sungai Pua (sebagai Laporan)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.jurnalhukumislam.com email: admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

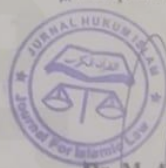
NAMA : ADIT SEKOFIER
NIM : 11727102197
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : WEWENANG KERAPATAN ADAT NAGARI SUNGAI PUA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DI NAGARI
SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM

Pembimbing: H. Mohd. Kastulani, SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 16 Agustus 2021

A. Pimpinan Redaksi



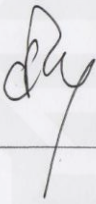
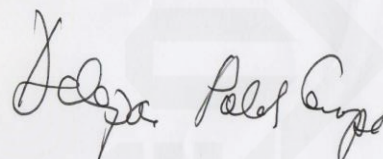

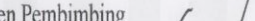
Dr. M. ALFI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



BLANKO NILAI PEMBIMBING

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial, iklan, atau publikasi lain yang sejenis.
 - Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Mahasiswa	ADIT SEKOFIER		
NIM	11727102197		
Program Studi	ILMU HUKUM		
Judul Skripsi	PELAKSANAAN WEWENANG KERAPATAN ADAT NAGARI SUNGAI PUA MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DI NAGARI SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM		
Nilai Huruf	Nilai Angka	NILAI	
A	85 – 100	Nilai Angka	Nilai Huruf
A-	80 – 84		
B+	75 – 79		
B	70 – 74		
B-	65 – 69		
C+	60 – 64		
C	55 – 59		Pekanbaru, 19 Juli 2021 Dosen Pembimbing  (H. MHD. KASTULANI, S.H., M.H.)
C-	50 – 54		
D	45 – 49		
E	0 – 49		



RIWAYAT PENULIS



Adit Sekofier, dilahirkan di Bukittinggi pada tanggal 29 Desember 1997. Anak ketiga dari lima bersaudara ini merupakan anak dari pasangan Alm. Nofiar dan Dra. Erna. Saat ini penulis tinggal di jalan Asta Karya. Penulis menempuh pendidikan mulai dari Taman Kanak

Pertiwi Panorama, melanjutkan Ketingkat Sekolah Dasar 01 Benteng Pasar Atas tamat tahun 2011, selanjutnya ketingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bukittinggi tamat tahun 2014 dan setelah itu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Unggul Bukittinggi tamat tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum serta memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2019 penulis melakukan magang di Kejaksaan Negeri Bukittinggi setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada tanggal 6 Agustus 2021 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Adit Sekofier, lahir di Bukittinggi pada tanggal 29 Desember 1997. Anak ketiga dari lima bersaudara ini merupakan anak dari pasangan Alm. Nofiar dan Dra. Erna. Saat ini penulis tinggal di jalan Asta Karya. Penulis menempuh pendidikan mulai dari Taman Kanak

Pertiwi Panorama, melanjutkan Ketingkat Sekolah Dasar 01 Benteng Pasar Atas tamat tahun 2011, selanjutnya ketingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bukittinggi tamat tahun 2014 dan setelah itu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Unggul Bukittinggi tamat tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum serta memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2019 penulis melakukan magang di Kejaksaan Negeri Bukittinggi setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada tanggal 6 Agustus 2021 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam”.